

TEHNIK MENANGKAP ORANG

Oleh P.M. Sitompul*

(Bagian Pertama)

Salah satu tugas Polisi adalah menangkap orang yang melakukan tindak pidana. Masyarakat mengira bahwa tugas penangkapan yang dilakukan oleh Polisi berjalan dengan lancar, asal dilakukan dengan ramah tamah dan penuh kebijaksanaan. Memang harus diakui banyak peristiwa penangkapan berjalan dengan aman dan lancar, tanpa ada unsur perlawanan dari si tersangka. Tetapi dalam kenyataan-kenyataan di lapangan sering ditemui adanya perlawanan fisik yang gigih dari si tersangka yang akan ditangkap Polisi. Banyak kita baca dari pemberitaan di surat kabar bahwa anggota Polisi yang akan menangkap si tersangka dengan tanpa kekerasan, justru gugur akibat kekerasan yang dilakukan oleh si tersangka.

Disinyalir akhir-akhir ini pelaku-pelaku kejahatan mempunyai kecenderungan untuk menggunakan kekerasan. Salah satu sebab terjadinya hal itu karena di dalam diri si penjahat tersebut, sudah tertanam suatu anggapan bahwa kejahatan yang dilakukannya hanya akan berhasil kalau dilakukan dengan menggunakan kekerasan. Menghadapi masalah perlawanan fisik dari si tersangka yang nyata-nyata telah melakukan tindak pidana, petugas Polisi sebenarnya dilindungi oleh undang-undang untuk melaksanakan tindakannya yaitu tercantum dalam pasal 49 KUHP, pasal 50 KUHP, pasal 51, dan pasal 216 KUHP.

Untuk mematahkan perlawanan fisik seseorang yang melakukan tindak pidana, seorang anggota Polisi harus hati-hati melaksanakannya karena dituntut adanya syarat keseimbangan antara serangan fisik yang datang dari si tersangka dengan pembelaan diri yang dilakukan oleh anggota Polisi tersebut.

Dari uraian tersebut di atas perlu kiranya setiap anggota Polisi

* Drs. P.M. Sitompul, S.H adalah Instruktur Bela Diri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian

dibekali ketrampilan teknik bela diri yang mantap guna mengatasi setiap perlawanan fisik para pelanggar hukum yang akan ditangkap.

Untuk mendapatkan suatu ketrampilan teknik menangkap, diperlukan adanya beberapa faktor penunjang yaitu:

1. Adanya suatu keberanian dari si petugas Polisi.
2. Latihan-latihan cara menangkap berulang kali.
3. Adanya tehnik-tehnik yang unggul dan baik untuk cara menangkap.
4. Adanya Instruktur/Pelatih yang cakap untuk melatih tehnik-tehnik menangkap orang.

Suatu tehnik menangkap akan dapat tetap diingat oleh seorang petugas Polisi apabila dilatih secara berulang kali, sehingga akhirnya dapat menghasilkan suatu ketrampilan tehnik menangkap yang baik. Yang dimaksud dengan tehnik menangkap yang baik adalah suatu tehnik menangkap yang praktis dan akurat serta tidak terlalu menimbulkan resiko bahaya bagi anggota Polisi yang melakukan penangkapan tersebut.

Apabila dilihat dalam dunia bela diri banyak jenis cara menangkap seseorang misalnya menangkap dengan tehnik memakai pukulan tangan, tendangan, dan menangkap dengan menggunakan tehnik kuncian atau grip. Di bawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat dari para ahli bela diri yang mempunyai pandangan khusus tentang tehnik menangkap dengan menggunakan cara kuncian atau grip.

Menurut pendapat BRUCE TEGNER seorang ahli bela diri Karate dan Judo dari Amerika Serikat mengatakan bahwa:

"Kelompok tunggal yang paling membutuhkan keahlian kuncian atau grip, kiranya hanyalah para anggota Kepolisian saja. Di hampir semua kota besar Amerika Serikat, jumlah hari-hari latihan mereka (Polisi) dititik beratkan pada latihan tehnik mengunci/grip dengan tangan kosong atau tanpa senjata."

Pandangan ahli bela diri Ju-jitsu dan ahli Judo yang bernama GENE LEE BELL and L.C. COUGHAAN tentang tehnik kuncian sebagai berikut:

"Bila mana keadaan memaksa untuk menggunakan kekerasan

an, maka hal ini harus dilakukan dengan secepatnya dan seefisien mungkin, tanpa mengakibatkan kerugian besar, misalnya dengan tehnik kuncian atau grip.

F.B.I. dan Angkatan Kepolisian memasukkan pelajaran bela diri dengan seluk beluk Kepolisiannya ke dalam program latihan yang diharuskan."

Kepolisian di Jerman Barat juga mengajarkan tehnik-tehnik kuncian dalam Daftar "G" yang harus dikuasai secara mutlak oleh anggota Polisi, hal tersebut dapat dilihat di buku: *Kriminal Maßnahmen im Ermittlungsverfahren*, di bagian sub Bab. "Selbstverteidigung (Ju-Jitsu)", di buku itu secara jelas memuat gambar-gambar bela diri Ju-Jitsu yang digunakan untuk tehnik menangkap seseorang.

Kepolisian Prancis juga memasukkan tehnik menangkap orang dengan menggunakan tehnik kuncian dicampur dengan tehnik tendangan dan pukulan, secara jelas dapat dilihat di buku *SELF DEFENSE PROGRAMME ELEMENTAIRE*. Buku pedoman bela diri *Self-Defense Programme Elementaire*, yang digunakan oleh Polisi Prancis selain memuat tehnik-tehnik kuncian untuk menangkap orang, juga menggunakan tehnik menangkap dengan memakai Jas/Jaket.

Kepolisian di Jepang terutama di lembaga pendidikannya menggunakan jenis bela diri Kendo (= tongkat bambu), Judo, dan Aikido (= dulu lebih dikenal dengan nama Aiki - Jutsu). Untuk tehnik menggunakan tongkat dipakai dasar-dasar bela diri Kendo, untuk tehnik membanting dipakai dasar-dasar bela diri Judo dan untuk tehnik mengunci/grip dipakai dasar-dasar bela diri AIKIDO.

Bela diri Aikido bentuk awalnya adalah dari bela diri Ju-Jitsu, sehingga bentuk-bentuk tehnik kuncian/grip dari bela diri AIKIDO mirip dan pada hakekatnya sama dengan bentuk-bentuk kuncian dari bela diri Ju-Jitsu. Hal tersebut disebabkan karena asal mula bela diri AIKIDO (= dulu bernama AIKI JUTSU) adalah merupakan bagian dari salah satu aliran cabang bela diri Ju-Jitsu. Dari penjelasan tersebut di atas ternyata Kepolisian di Amerika Serikat, Jerman Barat, Prancis, Jepang, memasukkan tehnik-tehnik kuncian/grip untuk menangkap orang sebagai latihan dasar dan dilatih secara terus menerus serta harus dikuasai oleh setiap anggota Polisi.

Ada empat alasan mengapa anggota Polisi sebaiknya mempelajari tehnik kunci/grip untuk menangkap orang tanpa senjata yaitu:

1. Tehnik kunci dapat digerakkan sebagai suatu tehnik untuk mempertahankan diri dari serangan seseorang.
2. Tehnik kunci dapat digunakan untuk menyerang dan menangkap sekaligus.
3. Tehnik kunci dapat digunakan sebagai latihan ketrampilan yang menarik, dan untuk olahraga ringan.
4. Tehnik kunci dapat digunakan untuk menangkap seseorang dengan sifat dapat dikontrol pelaksanaannya.

Arti daripada tehnik kunci dapat digunakan untuk menangkap orang dengan sifat dapat dikontrol pelaksanaannya adalah: bahwa seseorang yang mempelajari tehnik-tehnik kunci/grip dapat melakukan kunci pada seseorang dengan derajat kesakitan (akibat) dapat dikontrol menurut kehendak dari anggota Polisi yang melakukan tehnik kunci tersebut.

Tehnik kunci apabila mengenai seseorang dapat mengakibatkan 4 (empat) macam kemungkinan yaitu:

1. Tehnik kunci yang hanya mengakibatkan rasa nyeri (sakit).
2. Tehnik kunci yang dapat mengakibatkan patah tulang atau persendian. (contoh: patah persendian tangan, kaki dan sebagainya).
3. Tehnik kunci yang dapat mengakibatkan pingsan.
4. Tehnik kunci yang dapat mengakibatkan mati.

Empat macam kemungkinan tersebut di atas dapat dilakukan menurut kehendak dari si anggota Polisi yang melakukan tehnik kunci itu. Dalam hal ini anggota Polisi dihadapkan kepada empat macam pilihan, tinggal memilih kunci dengan jenis akibat apa yang ia kehendaki.

Tehnik kunci untuk menangkap orang tanpa senjata dapat dilakukan dari tiga posisi penyerangan yaitu:

1. Menangkap orang dengan tehnik kunci dari arah belakang.
2. Menangkap orang dengan tehnik kunci dari arah depan.
3. Menangkap orang dengan tehnik kunci dari arah samping.

Dalam tulisan ini akan diberikan contoh gambar-gambar tehnik

menangkap orang dari arah belakang, yang digunakan oleh Kepolisian Prancis, Jerman Barat dan Polisi USA.

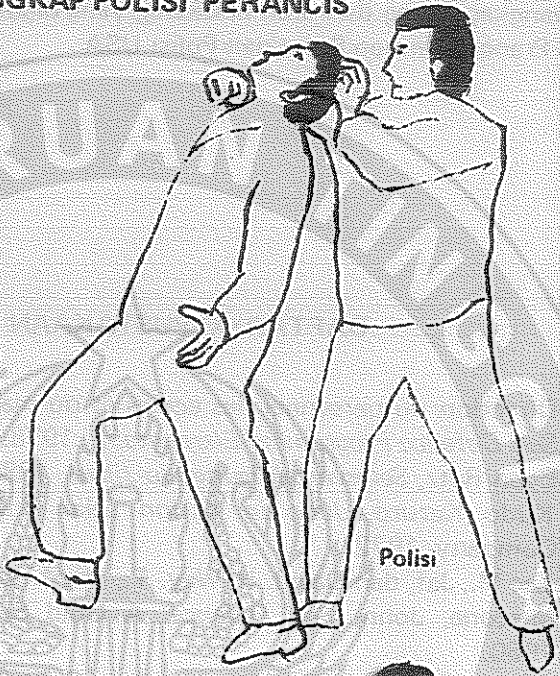
(bersambung)

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Direction du personnel des ecoles et du materiel de la Police, *Self Defence Programme Elementaire*, 1978.
- Egon Retz, *Selbsverteidigung (Ju-Jitsu)*, 1981.
- Kudo Kazuro, *Judo in Action* Jalan Publications Traiding Company, 1972.
- Lee M., Jaf, dan David. H. Way. T., *Hopkido*, Lancar 1979.
- Mertone, John, *Self Defence*, A Gold Sield Library Book, 1960.
- Sitompul, P.M., *Ju-Jitsu dan Ilmu Pernafasan*, C.V. Tarsito, 1982.
- Sylain, Georges. J., *Defence and Control Tae Ties*, 1975.

TEHNIK MENANGKAP POLISI PERANCIS

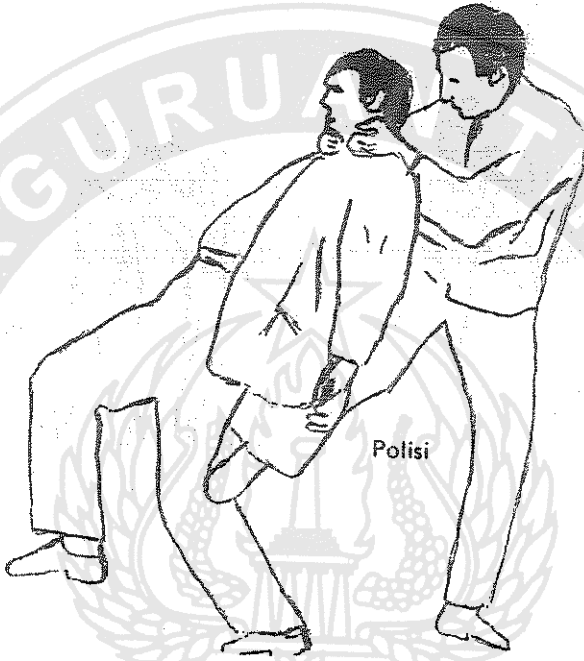
gerakan 1



gerakan 2



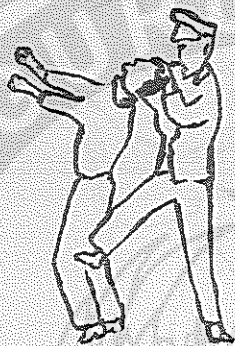
gerakan 3.



gerakan 4.



TEHNIK MENANGKAP POLISI JERMAN BARAT



gerakan 1



gerakan 2.



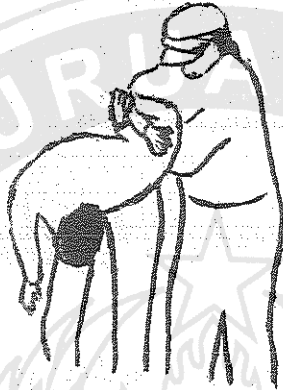
gerakan 3



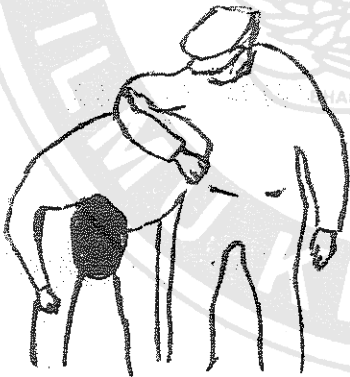
gerakan 4

TEHNIK MENANGKAP TANPA SENJATA POLISI USA

gambar 1.



Polisi



Polisi

gambar 2.



Polisi

gambar 3.

"BHAYANGKARA"

MAJALAH TRIWULAN ILMIAH POPULER & KEJURUAN

mengucapkan

Selamat & Sukses

Atas terpilihnya

Bapak SOEHARTO

menjadi

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

dan

Bapak Umar Wirahadikusumah

menjadi

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

REDAKSI

*RUANG APA & SIAPA
ANGGOTA POLRI*

**SOEPARNO SOERIAATMADJA
SEORANG ANGGOTA POLISI**

Oleh : Sunaryo

(bagian kedua — habis)

Masa Permulaan

Tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia telah memproklamlirkan Kemerdekaan Indonesia disusul dengan keluarnya UUD'45. Tugas selanjutnya adalah memimpin perjuangan untuk mendapat pengakuan dari seluruh dunia terutama pada negara-negara Barat (Sekutu) yang telah mendapatkan kemenangan perang atas Jepang.

Pada bulan September 1945 pihak Sekutu mendarat di Jakarta disertai dengan anggota Netherlands Indiesch Civil Administration (NICA) yang dipimpin oleh bekas Gubernur Jawa Timur Van Der Plaas.

Sementara itu pada bulan yang sama diadakan pertemuan di Jl. Kebunsirih yang membicarakan masalah lambang Kepolisian Indonesia yang akhirnya menetapkan lambang berbentuk bulat dengan warna merah di bagian atas dan putih di bagian bawah.

Raden Said Soekanto yang saat itu menjabat Kepala Sekolah Polisi di Sukabumi telah selesai mengambil alih tugas-tugas dari Kepolisian Jepang yang ada di sekolah Polisi Sukabumi. Pada tanggal 29 September 1945 ia diangkat oleh Pemerintah Republik Indonesia menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN) Republik Indonesia. Keadaan Jakarta yang semakin menghangat menyebabkan R.S. Soekanto tidak sempat melakukan banyak kegiatan.

Berbeda dengan orang-orang Jepang yang berada di daerah perbatasan seperti Bekasi dan Kerawang yang mengalami serbuan dari rakyat, orang-orang Jepang di Jakarta diperlakukan dengan baik, karena pemimpin mereka yang terang-terangan membantu perjuangan bangsa Indonesia, di antaranya adalah Laksamana Maeda.

Tanggal 5 Oktober 1945 sore, di Detasemen Kepolisian Cililitan Besar terjadi keributan, karena gugurnya tujuh belas anggota Polisi di Pondok Gede yang dikirimkan untuk menentramkan keributan di sana. Termasuk korban adalah Ajun Inspektur Polisi Kelas Satu R. Abas yang bertindak sebagai pemimpin. Dengan kejadian itu menimbulkan kemarahan sehingga Inspektur Polisi II A.J. Mokoginta, Komandan Polisi Istimewa Karesidenan Jakarta segera menyiapkan diri. Tetapi Jaksa Agung Mr. Gatot Tanumihardja berhasil menengahnya. Ia bersama Soeparno dengan segera berangkat ke Kawedanan Cawang untuk menemui Inspektur Polisi II A.J. Mokoginta untuk merubah niatnya, dan berhasil.

Suatu hari kantor Soeparno digrebeg Polisi Militer Sekutu di bawah pimpinan Kapten Holiday yang mendapat informasi bahwa di kantor Polisi Karesidenan Jakarta banyak terdapat senjata. Dan memang benar, senjata-senjata itu adalah hasil rampasan dari tentara Jepang. Soeparno dibawa ke hadapan Komandan Polisi Militer. Setelah diadakan tanya jawab, ia diperbolehkan pulang.

Sesuai dengan politik diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia, maka diadakan kerja sama antara Polisi RI dengan Polisi Militer tentara Sekutu yang ada di Jakarta. Pada mulanya kerja sama ini dapat berjalan lancar, karena Polisi RI diperlakukan sebagai partner yang sederajat. Dari kerja sama ini lahirlah Civil Police, sebagai gabungan antara Polisi RI dengan Polisi Militer tersebut. Namun perkembangan menunjukkan bahwa kerja sama itu hanya taktik belaka. Oleh karena itu Civil Police hanya mampu dipertahankan sampai akhir tahun 1945.

Situasi kota Jakarta makin lama makin panas. Pada bulan Desember 1945, diadakan pembicaraan antara Kepala Polisi Karesidenan Jakarta, Komisararis Polisi I Abdul Rifai, Soeparno

dan Residen Jakarta untuk mengambil keputusan bagi penyelaan barang-barang inventaris sebelum dirampas oleh tentara Inggris dan dikirim ke Subang.

Tanggal 8 Januari 1945 Soeparno ditugaskan untuk mengatasi adanya pendaulatan Jabatan Kepala Kepolisian Detasemen Purwakarta, yang dilakukan oleh Ajun Inspektur Polisi I Ojok Syahbandar terhadap Kepala Polisi Detasemen Purwakarta Komisarisi Polisi II Iskandar. Ia disertai oleh Kepala Kepolisian Karesidenan Jakarta, Komisarisi I Abdul Rifai. Tugas telah diselesaikan dan malahan Soeparno diangkat menjadi Kepala Polisi Daerah Kerawang Barat yang berkedudukan di Purwakarta.

Selama menjabat Kepala Polisi Detasemen Purwakarta, Soeparno dibantu oleh dua orang Perwira, yaitu Inspektur Polisi II Darmatin dan Inspektur Polisi II Abdul Rachman. Ia menjabat sebagai Kepala Polisi Detasemen Purwakarta hanya setahun, karena pada tanggal 20 Januari 1947 mendapat panggilan untuk masuk sekolah Polisi Negara Bagian Tinggi, yang kemudian menjadi Akademi Polisi di Jogyakarta. Panggilan tersebut diberitahukan oleh Komisarisi Polisi II Absar, yaitu Wakil Kepala Polisi Karesidenan Jakarta, ia diterima sebagai Mahasiswa Akademi Polisi Angkatan II/Abimanyu.

Sebagai wadah perkumpulan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terorganisasi, maka tanggal 15 Nopember 1945, dibentuk perhimpunan Mahasiswa Akademi Polisi (PMAP), yang kemudian menjadi Senat Perhimpunan Mahasiswa Ilmu Kepolisian (Senat PMIK) yang waktu itu diketuai oleh Katik Soeroso dan wakilnya Hugeng Iman Santoso, tetapi kemudian Soeroso diganti oleh Soebroto Brotodiredjo. Pada kepengurusan selanjutnya Soeparno diangkat menjadi Sekretaris Senat.

Akademi Polisi saat itu mempunyai Dosen dan Guru Besar, antara lain:

1. Prof.Dr.Mr. Soepomo, untuk mata pelajaran Hukum Adat yang menjabat sebagai Ketua Dewan Guru Besar.
2. Prof.Mr. Djoko Soetono untuk mata pelajaran Ilmu Negara.
3. Prof.Mr. Soenarjo K. untuk mata pelajaran Sosiologi.
4. Prof.Dr. Prijono untuk mata pelajaran Sejarah Kebudayaan.

5. Ki Hajar Dewantara untuk mata pelajaran Akhlak.
6. Komisaris Besar Polisi Soebarkah untuk mata pelajaran Teknik Kepolisian.

Untuk mata pelajaran yang bersifat teknik kepolisian dilaksanakan di Magelang dan yang bersifat akademis dilaksanakan di Yogyakarta.

Masa Agresi Belanda I dan Pemberontakan PKI Madiun.

Pada bulan April 1947 terjadi Agresi Belanda I. Persetujuan Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 tidak dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya. Karena pihak Belanda menganggap tahun sebelum Negara Indonesia Serikat (NIS) terbentuk, hanya Belanda-lah yang berdaulat di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan menurut Indonesia, sebelum NIS terbentuk kedaulatan tetap pada Pemerintah RI. Dengan dalih tindakan Kepolisian, Belanda mengerahkan angkatan darat, laut dan udaranya untuk menghantam wilayah RI. Semuanya ini dihadapi dengan gigih oleh TNI.

Sebagian besar Kantor Kepolisian Republik Indonesia jatuh ke tangan Belanda, hingga banyak didirikan Kantor Polisi darurat yang disebut kantong-kantong.

Atas perintah dari Kepala Kepolisian Negara RI, mahasiswa Akademi Polisi diperbantukan pada kantor-kantor Polisi setempat, Soeparno diperbantukan pada Dinas Pengawasan Keselamatan Negara (DPKN) Pusat Yogyakarta di bawah pimpinan Komisaris Besar Polisi Umar Khatab.

Tugas pertama yang dibebankan pada Soeparno adalah melaksanakan tugas kurir dari Jawatan Kepolisian Pusat. Ia harus menghubungi seluruh Pejabat-pejabat Polisi yang berada di daerah-daerah Kantong untuk menyampaikan pesan rahasia dari Kepala Kepolisian RI yang intinya berisi tiga hal yaitu:

1. Bahwa Jawatan Kepolisian Pusat yang berkedudukan di Yogyakarta masih ada, dan mengemban tugas sebagaimana mestinya.
2. Untuk anggota Polisi di daerah agar bertugas seperti biasa dan mempertahankan daerahnya sebagai wilayah kedaulatan RI.

3. Bagi yang membutuhkan keuangan untuk pembiayaan tugas daerah dapat mengambilnya di Jawatan Kepolisian Pusat di Yogyakarta.

Kecuali menyampaikan pesan, Soeparno juga diberi tugas untuk mengumpulkan informasi dari daerah-daerah.

Rombongan yang terdiri dari tujuh orang kursus Inspektur Polisi Magelang, yaitu: Toleh Ibrahim, Soedardjo, Soemarja, Soetrasno, Abubakar, Hidayat, Didin Djajadiningrat dan Soeparno sebagai pimpinan berangkat pada tanggal 8 Agustus 1947 dari Yogyakarta menuju Parakan dengan KA. Setelah menyampaikan pesan kepada Kepala Kepolisian Parakan, dilanjutkan ke Wonosobo dan kemudian ke Banjarnegara. Di Banjarnegara disambut oleh Bupati Banjarnegara, yaitu Soemitro Kolopaking.

Tujuan berikutnya adalah Candiwulan untuk menyampaikan pesan khusus KKN kepada wakilnya R. Soemarto. Tugas inipun berhasil dengan baik. Tugas terakhir adalah menemui Komisaris Besar Polisi Jusuf, yaitu Kepala Pengawas Polisi Jabar, yang berkedudukan di Ciamis. Dalam menghadapi situasi-situasi di perjalanan Soeparno dibantu oleh Bambang Soeprapto yang memberinya informasi sewaktu rombongan berhenti di Karangnongko.

Sebelum memasuki kota Banyumas, rombongan telah bertemu dengan Kepala Polisi Banyumas, Soeparno segera menyampaikan pesan. Perjalanan dilanjutkan, sementara itu anggota rombongan Soetrasno dan Abubakar ditinggalkan di Banyumas untuk melaksanakan tugas-tugas khusus. Tugas telah disampaikan pada Komisaris Besar Polisi Jusuf dan perjalanan dilanjutkan lagi. Rombongan kembali pecah, Soedardjo dan Soenarya ke Cirebon, lainnya ke Singaparna.

Pesan-pesan KKN disampaikan, lalu menuju desa Legokasih daerah Garut, yaitu tempat kedudukan Kepala Polisi Karesidenan Priangan Malek Wiranatakoesoemah. Tujuan selanjutnya adalah Sumedang tetapi di Garut rombongan dipecah lagi, Didin Djajadiningrat dan Hidayat ke Sukabumi, sedangkan Soeparno dan Toleh Ibrahim ke Subang. Dari Subang langsung ke Buahdua yang merupakan Kantor Polisi Karesidenan Jakarta. Dengan demikian tugas sebagai kurir telah dilaksanakan dengan

baik oleh Soeparno.

Dalam perjalanan pulang di mana Soeparno ditemani Toleh Ibrahim dari awal perjalanan, ada suatu hal yang sangat berharga untuk Toleh Ibrahim atas kepribadian Soeparno, antara lain yaitu:

Kang Ino (Soeparno) adalah seorang yang layak untuk dijadikan contoh, ia mempunyai kepribadian yang kuat, kesanggupannya untuk kerja sangat tinggi, sangat tenggang rasa, baik terhadap atasan, apalagi bawahan.

Rute yang dilalui pada perjalanan kembali meliwati Kuningan masuk Banyumas lewat utara sungai Citandui. Banyumas dilalui kemudian Banjarnegara, Wonosobo, Tarakan dan akhirnya sampai di Yogyakarta tanggal 16 Oktober 1947.

Selesai melaksanakan tugas, Soeparno kembali ke bangku kuliah dan kembali sibuk dengan kuliah dan mengelola masalah majalah Bhayangkara.

Di bawah pimpinannya majalah Bhayangkara mengalami kemajuan pesat dan bisa tersebar ke seluruh anggota Polisi di Indonesia. Hal ini dikemukakan juga oleh Mahasiswa Akademi Polisi Angkatan I (Soebroto Brotodiredjo).

Bulan Nopember 1948 Soeparno ditugaskan ke Madiun untuk mengadakan pengamatan dan memberikan laporan secara terperinci tentang kejadian pemberontakan PKI serta situasi sebenarnya. Ia mengadakan penyelidikan sampai ke Ponorogo untuk mencari keterangan dari saksi hidup dalam peristiwa Madiun, dan kembali ke Yogyakarta untuk melaporkannya pada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Baru beberapa hari, ia kembali tugas ke Blora untuk mengecek kejadian dimana pamannya Bupati Blora terbunuh. Setelah semua selesai baru ia kembali ke bangku kuliah sampai saat liburan.

Masa Agresi Belanda II dan Sesudahnya.

Selama di Yogyakarta Soeparno tinggal bersama-sama tiga orang adiknya, di rumah seorang Anggota TNI-AD, Kapten Soedjono. Ia satu kamar dengan Kolonel Simatupang, yang pada saat itu menjabat sebagai KSAD.

Tanggal 18 Desember 1948 ia diajak oleh Kolonel Simatupang ke Kaliurang, tetapi Soeparno menolak. Kepergian Kolonel

Simatupang adalah untuk menemui Bung Hatta dan menyampaikan informasi tentang pembentukan Negara Federal oleh Belanda dan mengenai pesawat udara yang akan membawa Bung Karno ke India, masih ditahan Belanda di Yogyakarta.

Tanggal 19 Desember 1948 Simatupang meninggalkan kota Yogyakarta entah ke mana, sedangkan Soeparno dan Abdul Rachman juga meninggalkan Yogyakarta ke utara. Walaupun begitu Soeparno setiap hari pergi ke kota untuk menyampaikan informasi atau kebijaksanaan dari pengurus Senat Mahasiswa pada kawan-kawannya.

Sementara itu di Sumatera terbentuk Pemerintah Darurat RI, dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara pada tanggal 22 Desember 1948. Tanggal 7 Mei 1949 tercapai perjanjian Room-Royen yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Penarikan mundur tentara Belanda dari Yogyakarta.
2. Kembalinya Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta.
3. Mengadakan KMB.

Dengan adanya perjanjian ini, situasi kota Yogyakarta, membaik dan Soeparno kembali menetap di Yogyakarta, secara mendadak Soeparno diperbantukan pada Pemerintah RI di Yogyakarta di bawah pimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono ke IX untuk membantu pengoperan penjagaan di perbatasan kota Yogyakarta dari tentara Belanda kepada tentara Nasional Indonesia; secara keseluruhan tentara Belanda ditarik kembali dari Yogyakarta pada bulan Juli 1949.

Kemudian Soeparno ditugaskan untuk mengoper tugas-tugas di Kantor Kepolisian Karesidenan Banten. Rombongan dipimpin oleh Komisaris Polisi II Soedarsono bersama lima orang anggotanya, yaitu: Soeparno, Soekardjono, Moekarno, Soedardjo, dan Soehardjo. Mereka berangkat tanggal 20 Nopember 1949 menuju Jakarta untuk menghadap Kepala Kepolisian Negara R. Soemarto. Setelah menghadap, rombongan melanjutkan perjalanan ke Banten diantar oleh Komisaris Polisi I Van Der Kuyn-der.

Jabatan Kepala Polisi Banten dipegang oleh Komisaris Polisi II Loekman yang menggantikan Komisaris Polisi Jusuf yang

belum lama berselang dibunuh oleh gerombolan Chairul Saleh, sedangkan Wakilnya ditunjuk Inspektur I Soeparno.

Sebagai Wakil Kepala Polisi Karesidenan Banten, Soeparno mulai dengan tugas-tugas yang telah dijadwalkan secara mantap. Tugas pertama adalah mengadakan tugas keliling, dimulai dari Serang, Rangkasbitung, Pandeglang, Menes, Labuan dan menuju Merak.

Perjalanan seperti itu dilakukan setiap bulan sekali, dengan maksud untuk menampung semua informasi, kekurangan dan kesulitan yang dihadapi Kepolisian daerah.

Bulan Mei 1950, Soeparno dipanggil ke Jakarta untuk mengadakan orientasi di bidang Kepolisian di Amerika Serikat bersama Saleh Sastranegara, Soebroto Brotodiredjo, Wiem Sumampow, Harsidik, dan pimpinan rombongan Komisaris Besar Polisi Soebarkah. Tetapi sebelum itu ia ditugaskan untuk menyelidiki pembunuhan terhadap dua orang Amerika, yaitu Kenedy dan Doyle yang sedang melakukan perjalanan dari Bandung ke Cirebon. Ia dibantu oleh Komisaris Polisi II Tachya.

Keberangkatan ke Amerika Serikat baru dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1950 setelah diperkenalkan kepada Perdana Menteri dan merangkap Menteri Luar Negeri Moch. Hatta.

Di San Fransisco, rombongan mengadakan peninjauan keadaan Kepolisian di sana. Begitu pula di Washington rombongan mengunjungi Police Academy dan FBI, juga Military Police. Kesempatan berikutnya mengunjungi pejabat-pejabat Perwakilan Pemerintah Indonesia di Amerika Serikat, antara lain Palar sebagai Wakil Pemerintahan RI di PBB, Ali Sastroamijoyo, Duta Besar RI, Soedarmo sebagai Kepala Perwakilan Penerangan KBRI, Max Maramis sebagai Kepala Bagian Politik KBRI dan Meriam Budiardjo sebagai Staf KBRI untuk melengkapi data dan informasi tentang Kepolisian di Amerika Serikat, rombongan melanjutkan perjalanan ke Atlanta, yaitu ibu kota negara bagian South Carolina, kemudian berakhir ke Indianapolis.

Bagaimana sibuknya Soeparno, ia berusaha membagi waktunya dengan baik untuk kepentingan Kemahasiswaan, tetapi penanggung jawab majalah Bhayangkara dan setiap saat harus selalu mendampingi Dekan maupun Dosen terutama Prof. Djoko Soetono di dalam menulis karangan-karangannya.

Di tengah-tengah kesibukan, Soeparno melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 April 1953, dengan Siti Soeriah. Anak pertamanya lahir tanggal 27 Juli 1954. Peristiwa bersejarah besar yang dilakukan oleh Angkatan II adalah pengucapan Tribrata untuk pertama kalinya pada tanggal 3 Mei 1954 yang dibacakan oleh Soeparno sebagai kepala rombongan Angkatan II/Abimanyu.

Kelahiran Tribrata sendiri sebenarnya melalui proses yang panjang. Ide yang pertama kali datang dari Prof. Djoko Soetono, kemudian disempurnakan bersama Prof. Prijono. Hanya sayang pencetusan ide ini tidak diikuti dalam penerangan bentuk tulisan atau karya ilmiah. Hal inilah yang mendorong Soeparno mencoba untuk menuliskan Tribrata beserta penjelasannya. Setelah itu, pada tanggal 1 Juli 1955, Tribrata dikrarkan di depan Presiden Republik Indonesia bertempat di lapangan Banteng. Sejak itu Tribrata dipakai sebagai Pedoman hidup warga Kepolisian RI.

Peranan Soeparno Setelah Lulus PTIK.

Dengan pangkat Komisaris Polisi II dan gelar Doktorandus Ilmu Kepolisian yang diperolehnya setelah lulus PTIK pada tanggal 3 Mei 1954, Soeparno ditempatkan pada Departemen Kepolisian Pusat. Pertama kali ditempatkan untuk urusan luar negeri yang dikoordinir oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Abdul Rachman S. Jabatan resminya adalah sebagai Staf Sekretaris KKN yang kemudian dipindah sebagai Ajudan Sekretaris KKN bersama dengan Komisaris Polisi I Soebroto Brotodiredjo.

Sesuai dengan ketrampilannya Soeparno diberi tugas untuk menyusun peraturan-peraturan antara lain adalah PP No. 57 tahun 1958, tentang susunan Kepolisian Negara RI yang terdiri dari dua bagian yaitu susunan Kepolisian Negara di Pusat dan susunan Kepolisian Negara di daerah. PP No. 57 tahun 1958 pada pokoknya mengatur bahwa selain Kepolisian Pusat, di daerah-daerah dibentuk Komisariat-komisariat dan yang dipimpin oleh Kepala Polisi.

Peraturan lainnya dikeluarkan tanggal 28 Agustus 1957 dengan Surat Keputusan KKN No. 132/PNUK, mengenai peraturan Polisi Negara Urusan Kereta Api dan sebagai pimpinannya

ditunjuk Inspektur Polisi I Tobing. Sedangkan Soeparno sendiri kini menjabat pemimpin seksi Perundang-undangan.

Di dalam tugas menyusun organisasi Kepolisian, Soeparno bekerja keras untuk membuat peraturan-peraturan mengenai pembentukan Kepolisian Nasional Indonesia. Kemudian ia meneruskan ide untuk merubah Direktorat System menjadi General Staf System yang berlaku setelah tahun 1959.

Dengan adanya pergantian pimpinan teras Kepolisian RI secara mendadak, dari RS. Soekanto Tjokrodjatmodjo kepada Soekarno Djojonagoro, sebagai Menteri Muda Kepolisian RI, Soeparno yang merasa tidak puas, pergi menghadap Perdana Menteri yang merangkap Menteri Pertahanan Djuanda bersama Komisariss Besar Polisi Hugeng Iman Santoso. Tetapi tindakan ini malah mengakibatkan dipecatnya Soeparno dari jabatannya. Ia digantikan oleh Komisariss Polisi I Soemartono.

Dengan adanya pergantian pimpinan, maka peraturan-peraturan mengenai organisasi Kepolisian yang dibuat susah payah oleh Soeparno diganti dengan peraturan baru yang mula berlaku tahun 1961. Di dalam peraturan baru banyak terdapat kejanggalan, seperti ada pasal yang menyatakan bahwa, peraturan-peraturan lama dinyatakan hapus. Padahal banyak peraturan-peraturan lama yang tidak tercakup dalam peraturan baru.

Sekitar bulan Juni 1960, Soeparno dialih tugaskan menjadi Kepala Polisi Komissariat Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Selama menjabat KPKOM, Soeparno banyak mengunjungi daerah-daerah dan pulau-pulau terpencil. Kecuali tugas-tugas rutin, tugas khusus yang dibebankan adalah melaksanakan pembangunan secara fisik, asrama dan perlengkapannya.

Sementara itu di pusat rupanya terjadi kekalutan, Soeparno segera dipanggil ke pusat melalui Komisariss Polisi I Djen Mohammad Soerjopranoto. Tanggal 6 Februari 1962 secara resmi Soeparno diangkat menjadi Kepala Sekretariat Departemen Kepolisian Republik Indonesia. Pada waktu menjabat KPKOM Kalimantan Selatan, Soeparno mendapat kenaikan pangkat setingkat menjadi Komisariss Besar Polisi, sesuai dengan Surat Keputusan Presiden RI No. 446/M. tahun 1961, tanggal 26 Oktober 1961.

Soeparno kemudian diserahi tugas menyusun kembali peraturan-peraturan, terutama untuk: Kepolisian Pusat, Kepolisian Daerah, Departemen-Departemen dan Komisariat Jenderal. Bulan Maret 1962 Soeparno diangkat sebagai Asisten II Kastaf Komisariat Jenderal Markas Besar Kepolisian Negara disusul juga dengan kenaikan pangkatnya menjadi Brigadir Jenderal Polisi dengan Surat Keputusan Presiden No. 01/AB-Pol, tahun 1963, tanggal 1 Januari 1963. Pada kenaikan pangkat tersebut Soeparno menduduki jabatan Deputy III Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian Urusan Khusus, mulai tanggal 25 Oktober 1962.

Pada suatu waktu Soeparno dipanggil oleh Perdana Menteri Soebandrio karena ia tidak setuju dengan diangkatnya seorang Menteri Muda Kepolisian berpangkat AKBP yang kemudian dinaikan pangkatnya menjadi Inspektur Jenderal Polisi (tiga tingkat di atasnya) yaitu Soetjipto Danoekoesoemo menggantikan Soekarno Djojonagoro.

Soeparno juga pernah ditawarkan untuk menjabat Deputy I/ Operasi tetapi ditolaknya, ia malah mengusulkan Brigjen Polisi Drs. Hugeng Imam Santoso, dan usul itu diterima. Sedangkan Soeparno sendiri melakukan perjalanan ke luar negeri untuk melakukan pembelian bagi persenjataan Mobrig. Ia juga pernah ditawarkan untuk dinaikan pangkatnya menjadi Inspektur Jenderal Polisi, juga ditolaknya, tetapi 1 Januari 1966 jabatan itu disandanginya. Menjelang berakhirnya jabatan Soetjipto Joedodihardjo sebagai Men Pangak, Soeparno dimintai pertimbangan lagi, dan ia mengusulkan Hugeng Iman Santoso dan usul itupun diterima.

Soeparno kemudian minta diberhentikan sebagai jabatan Deputy Pembinaan dan menjadi Staf Men Pangak, akibat diangkatnya Teuku Abdul Aziz menjadi Deputy Intel, di mana jabatan Deputy Intel adalah lebih senior dengan Deputy Pembinaan. Dengan pengangkatan ini keadaan menjadi berbalik. Jabatan ini tidak lama, karena tanggal 24 Februari 1969, Soeparno diangkat menjadi Deputy III Lemhanas hingga mengantarkannya ke masa persiapan pensiun di tahun 1972.

Tri Brata Menurut Soeparno Sebagai Anggota Polisi.

Tri Brata secara juridis pertama kalinya diucapkan pada hari Bhayangkara pada tanggal 1 Juli 1955 oleh KKN RI. Tri

Brata merupakan hasil penggalian sejarah yang diambil dari kepribadian dan pula Kepolisian yang dilakukan oleh Prof. Djoko Soetono. Sayang, karya besar yang diperuntukkan bagi perkembangan kehidupan Kepolisian Republik Indonesia tidak sempat dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah sehingga tidak ada dokumen resmi yang merupakan sumber asli.

Soeparnolah kemudian yang mencurahkan pikirannya untuk menulis buku tentang Tri Brata di mana bahan-bahannya diambil dari kuliah-kuliah, hasil diskusi, ceramah-ceramah, wawancara pribadi dengan Djoko Soetono dan juga penjelasan dari Prof. Prijono yang telah menyusun rumusan Tri Brata dalam bahasa Sanskerta.

Perumusan Tri Brata oleh Soeparno, tidak seluruhnya sama dengan ide yang dicetuskan oleh Djoko Soetono, sebab Soeparno meninjaunya dari segi Kepolisian. Sedangkan Djoko Soetono meninjau dari segi Ilmu Negara. Lebih jauh Soeparno dalam tulisannya tentang Tri Brata, memberikan penjelasan tentang: "Perkembangan Kepolisian Ke arah Tri Brata", hal inilah merupakan bagian yang terpenting.

Karya tulis Soeparno.

Salah satu karya tulis Soeparno adalah Sejarah Kepolisian dari zaman klasik sampai dengan zaman modern di mana di dalamnya ditemukan beberapa hal yang merupakan hambatan terutama dalam pengumpulan bahan-bahan yang memang sulit didapat.

Menurut Soeparno Sejarah Kepolisian di Indonesia banyak hubungannya dengan Sejarah Kepolisian di Netherland. Hal ini disebabkan karena Indonesia pernah dijajah Belanda. Mengenai soal-soal apa tentang Kepolisian yang telah disajikan dengan penulisan sejarah, Soeparno mendasarkan pandangannya pada ide Kepolisian yang berpangkal tolak pada "Tugas Polisi". Dasar pemikirannya ini diilhami oleh pendapat Prof. Kranenburg yang menurutnya tugas polisi dapat dilihat dari dua segi yaitu:

- Dari segi tujuan tugas.
- Dari segi pelaksanaan tugas.

Selain karya tulisnya itu, Soeparno juga menulis tentang masalah Status Kepolisian Negara. Tulisan ini dibuat sehubungan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 terutama pasal 130. Tulisan ini dimuat dalam majalah Bhayangkara.

Karya tulis Soeparno yang lain adalah tentang Kepolisian di Amerika Serikat dalam perbandingan dengan Kepolisian di Indonesia. Tulisan ini dibuat sekembalinya dari Amerika Serikat pada tahun 1953. Sedangkan tulisannya yang terakhir adalah Asta Gatra Indonesia. Tulisan ini disusun Soeparno untuk Kursus Istimewa I Lembaga Pertahanan Nasional pada bulan Nopember 1973.

Masa Pensiun.

Soeparno memasuki masa persiapan pensiun (MPP) pada tanggal 30 Maret 1972 dengan Surat Keputusan Presiden No. 53/ABRI/1972. Masa Persiapan Pensiun ini dihabiskan Soeparno sebagai Perwira Tinggi diperbantukan pada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Dua tahun kemudian menyusul Surat Keputusan Presiden No. 35/ABRI/1974 yang menetapkan bahwa sejak tanggal 31 Maret 1974, Soeparno secara resmi melaksanakan masa pensiun penuh yang disambutnya dengan perasaan yang lega dan puas, karena ia telah menyumbangkan segala apa yang dimilikinya untuk membangun Kepolisian Republik Indonesia.

Tetapi perasaan lega itu hanya sebentar, dengan Surat Keputusan Presiden No. 108/m tahun 1974, Soeparno diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Sosialis Kesatuan Burma di Rangun. Dalam menjalankan tugasnya, Soeparno berhasil menjadi penghubung dalam kerja sama antara Pemerintah Burma dengan Pemerintah Amerika Serikat dalam masalah pembangunan. Selain itu Soeparno juga berjasa dalam mendekatkan hubungan antara Republik Indonesia dengan Republik Kesatuan Burma dalam hal "Perjanjian Udara".

Sekembalinya di tanah air ia bekerja sebagai Dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dalam jurusan Sejarah Kepolisian

dan Falsafah & Etika Kepolisian. Selain itu Soeparno ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas Bank Export & Import Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Presiden No. 95/M tahun 1980.

MENGUCAPKAN SELAMAT ATAS PENGANGKATAN

LETNAN JENDRAL POLISI

ANTON SOEDJARWO

SEBAGAI KAPOLRI

REDAKSI BAYANGKARA

MENGUCAPKAN SELAMAT ATAS PENGANGKATAN

DRS. MAYOR JENDRAL

H. PAMUDJI

SEBAGAI DEPUTY KAPOLRI

REDAKSI BAYANGKARA